

**PENGARUH BELANJA PEMBANGUNAN TERHADAP KETIMPANGAN
DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA**

**Lidwina Lidia Kasipmabin¹
Nyoman Djinar Setiawina²
Ida Bagus Putu Purbadharmaja³**

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali
Email : kasipmabinlidwina@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Belanja Pembangunan (bidang sosial, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat desa) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota Provinsi Papua. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua dan dinas terkait lainnya. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis jalur atau *path analysis* dan analisis deskriptif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dari tahun 2010 sampai dengan 2012 terdapat pengaruh yang signifikan dari belanja pembangunan (bidang sosial, kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat desa) terhadap kesejahteraan masyarakat secara langsung maupun secara tidak langsung menunjukkan bahwa Pemerintah daerah hendaknya lebih mengutamakan kesesuaian atau keserasian anggaran, optimalisasi anggaran bersifat inovatif, serta adanya *political will* dan komitmen pemerintah terhadap alokasi pengeluaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan anggaran belanja daerah agar kesejahteraan masyarakat baik sosial, kesehatan, pendidikan maupun pemberdayaan masyarakat desa dapat meningkat sesuai dengan yang diharapkan pemerintah selama ini.

Kata kunci : belanja pembangunan, kesejahteraan masyarakat, IPM

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of development expenses (social, health , education, empowerment of rural communities) to inequality of income distribution and welfare districts / cities province. The data used are secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) Papua and other related institutions. Analytical techniques used are strip analysis or path analysis and descriptive analysis. The results of this study showed that from 2010 up to 2012 there are no significant influence of the development expenses (social, health, education and empowerment of rural communities) to the welfare of society as a direct or indirect indication that the regional government prefers let the suitability or compatibility estimates, are estimates innovative optimization, as well as the political will and government's commitment to the allocation of production according to the needs of the community to improve the county budget to social well- being of society, health, education as well as the empowerment of rural communities can be increased according to the expected government over the years.

Keywords: cost of development, prosperity, IPM

PENDAHULUAN

Salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur dengan baik adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran daerah merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan/pendapatan dimasa yang akan datang. Umumnya disusun untuk satu tahun. Salah satu instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah, anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah.

Belanja pemerintah kabupaten/kota merupakan angka konsolidasi dari 29 pemerintahan kabupaten/kota di Papua. Belanja pembangunan pemerintah daerah pada penelitian ini adalah belanja urusan wajib dalam bidang social, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pada periode 2006-2012 belanja pemerintah kabupaten/kota mendominasi belanja pemerintah di provinsi Papua dengan sumbangan rata-rata pertahun sebesar 68,3 persen (BPS Papua;2011). Secara keseluruhan ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Papua selama tahun 2010 – 2012 mengalami peningkatan. Artinya selama periode tersebut pendapatan per kapita masyarakat semakin timpang.

Kebijakan dan Program yang dapat dilakukan oleh Pemerintah sesuai Pemberlakuan Khusus kepada daerah Papua yang mengacu dari UU OTSUS No.21/2001 dapat dilakukan melalui, “Penerapan sistem pendidikan yang sesuai dengan ciri khas Papua; muatan lokal dan etnografi Papua, Pendidikan berpola asrama karena sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi Papua (peningkatan pendidikan dasar dan menengah berpola asrama). Pemberian Program beasiswa dan Dana Biaya Operasional Pendidikan dasar

dan menengah untuk meningkatkan mutu pendidikan; memberikan beasiswa bagi putra-putri Asli Papua dengan tujuan meningkatkan SDM dan penguasaan IPTEK serta peningkatan kualitas pendidik dan pengajar.

Masyarakat Papua dikategorikan dari bidang sosial ekonomi dan infrastruktur bahwa secara keseluruhan wilayah Kabupaten/Kota belum merasakan seoptimal mungkin kesejahteraan. Di bidang pendidikan, seperti kurangnya mutu pendidikan anak dan tenaga pengajar yang disebabkan oleh sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Segi kesehatan, mutu pelayanan kesehatan belum optimal sehingga banyak problem kematian ibu dan bayi serta kurangnya sosialisasi pelayanan kesehatan sehingga angka HIV AIDS meningkat. Di lain sisi, infrastruktur pembangunan yang kurang memadai, dan belum dapat menikmati Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang canggih dalam pemberdayaan manusia dan masyarakat Papua di era globalisasi dan modern dengan baik, seperti daerah-daerah di pedalaman, pegunungan, pesisir pantai (kepulauan) yang masih terisolir. Oleh karena itu, maka perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah dan pusat dalam menangani manajemen pengelolaan keuangan daerah atau pendistribusian pendapatan dan pembangunan daerah yang merata sesuai kebutuhan setiap daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua. Dengan demikian, setiap Warga Negara dapat menggapai pendidikan yang layak, memperoleh pelayanan kesehatan yang baik, ikut serta (berpartisipasi) bersama pemerintah dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta dapat mewujudkan suatu Masyarakat Adil dan Makmur (MAM) yang siap membangun bangsa atau daerah menuju ke arah kemajuan.

Problematika yang muncul di kabupaten/Kota di Provinsi Papua tersebut diatas adalah disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketimpangan distribusi pendapatan yang tidak merata pada Pengelolaan Keuangan melalui Belanja Daerah (bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat Papua) yang belum digunakan dan diberdayakan sepenuhnya secara optimal dan berkelanjutan bagi Rakyat Papua.

Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka masalah penelitian yang diangkat dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Apakah Belanja Pembangunan (bidang sosial, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat desa) berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota Provinsi Papua ?
- 2) Bagaimanakah Belanja Pembangunan (bidang sosial, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat desa) berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota Provinsi Papua ?

Tujuan Penelitian

Secara spesifik penelitian bertujuan untuk:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh Belanja Pembangunan (bidang sosial, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat desa) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota Provinsi Papua.

- 2) Untuk mengetahui pengaruh tidak langsung belanja pembangunan (bidang sosial, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat desa) terhadap kesejahteraan masyarakat melalui ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota Provinsi Papua.

KAJIAN PUSTAKA

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD memuat rincian semua penerimaan daerah di satu sisi, dan semua pengeluaran daerah di sisi lain. Pada sisi penerimaan, APBD terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Di sisi pengeluaran APBD terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan pemerintah. Menurut PAU-SE (Universitas Gadjah Mada) menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai, sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, DPRD dan pemerintah daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada

kepentingan dan akuntabilitas publik. Suatu anggaran yang telah direncanakan dengan baik hendaknya disertai dengan pelaksanaan yang tertib dan disiplin sehingga tujuan atau sasarannya dapat dicapai secara berdayaguna dan berhasilguna.

Konsep Ketimpangan

Gini Ratio adalah ratio dari suatu ukuran pemerataan, dimana ratio ini digunakan untuk mengukur ketimpangan suatu nilai sesuai dengan distribusi frekuensinya, dan sering dipakai untuk mengukur ketimpangan pendapatan rakyat suatu negara atau daerah. Data yang diperlukan dalam penghitungan Gini Ratio adalah jumlah rumah tangga atau penduduk dan rata – rata pendapatan atau pengeluaran rumah tangga yang sudah dikelompokkan menurut kelasnya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Paradigma pembangunan manusia ini memiliki 4 (empat) pilar perekonomian yang mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut (Bappenas, 2004). Produktivitas (*productivity*), Pemerataan (*equity*), Kestinambungan (*sustainability*), Pemberdayaan (*empowerment*). Indeks Pembangunan Manusia didasarkan pada tiga kategori yaitu, (1) *longevity* dicerminkan dalam indeks harapan hidup (indeks X_1); (2) *Educational attainment* yang diukur dengan kombinasi antara tingkat melek huruf dan rata-rata lama sekolah (indeks X_2); (3) *standard of living* yang diukur dengan pendekatan pengeluaran konsumsi per kapita dalam PPP rupiah (indeks X_3). Skala IPM adalah antara 1 sampai

100. Semakin dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 100 semakin dekat jalan yang harus ditempuh untuk mencapai sasaran.

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat menurut Pigou seperti yang dikutip oleh Chopra (1981) adalah kepuasan agregat dari semua individu dalam masyarakat. Dalam tulisan yang berjudul "*Wealth and Welfare*" tahun 1912, Pigou menyatakan bahwa kesejahteraan individu ditunjukkan oleh kepuasan yang diperoleh individu atas konsumsi barang dan jasa dihubungkan dengan pendapatan riil. Dalam hal ini kepuasan individu dapat diukur secara kardinal sehingga bisa dijumlahkan menjadi kesejahteraan masyarakat.

Penelitian Sebelumnya

Chakraborty (2003), meneliti mengenai pengaruh pengeluaran publik di sektor kesehatan dan sektor pendidikan terhadap *human development index* (HDI) dan *gender-related development index* (GDI). Penelitian ini menggunakan regresi linier, dengan data pooling dari 15 negara dari tahun 1993 sampai dengan tahun 1995. Variabel bebas yang digunakan adalah variabel yang dianggap mempengaruhi HDI dan GDI, yaitu pengeluaran bidang sosial per kapita (kombinasi bidang kesehatan dan bidang pendidikan) dan pertumbuhan pendapatan per kapita. Hasilnya kedua variabel berpengaruh secara signifikan terhadap HDI dan GDI

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mengambil dari berbagai dokumentasi, atau atau publikasi dari berbagai pihak yang berwenang dan instansi terkait seperti laporan publikasi Bank Indonesia dan literatur-literatur yang mendukung dalam penelitian ini. Data yang dipergunakan adalah data pengeluaran pemerintah, IPM Kabupaten/kota Provinsi Papua selama periode 2010-2012.

Analisis Data

Data sekunder yang terkumpul selanjutnya di analisis dengan menggunakan analisis jalur dengan data panel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh belanja pembangunan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Papua. Koefisien jalur pada penelitian ini diperoleh dari hasil perhitungan regresi dengan metode regresi sederhana (*Ordinary Least Square = OLS*) dengan menggunakan program SPSS versi 20 terhadap model persamaan.

Tabel 1
Ringkasan Koefisien Jalur

Hubungan	Koefisien Regresi		Standard Error	t hitung	P. value	Keterangan
	Standar	Tak Standar				
$X_1 \rightarrow Y_1$.220	1.694E-6	.000	2.427	.017	Signifikan
$X_2 \rightarrow Y_1$.056	1.239E-7	.000	.446	.656	Signifikan
$X_3 \rightarrow Y_1$.502	5.476E-7	.000	4.241	.000	Signifikan
$X_4 \rightarrow Y_1$	-.083	-2.939E-7	.000	-.839	.404	Non Signifikan
$X_1 \rightarrow Y_2$.196	.000	.000	2.386	.019	Signifikan
$X_2 \rightarrow Y_2$	-.188	-6.887E-5	.000	-1.723	.089	Non Signifikan
$X_3 \rightarrow Y_2$.315	5.655E-5	.000	2.759	.007	Signifikan
$X_4 \rightarrow Y_2$.003	1.773E-6	.000	.035	.972	Non Signifikan
$Y_1 \rightarrow Y_2$.609	100.463	15.880	6.326	.000	Signifikan

Keterangan :

X_1 adalah variabel Pengeluaran Pemerintah bidang sosial

X_2 adalah variabel Pengeluaran Pemerintah bidang kesehatan

X_3 adalah variabel Pengeluaran Pemerintah bidang pendidikan

X_4 adalah variabel Pengeluaran Pemerintah sektor Pemberdayaan Masyarakat Desa

Y_1 adalah Ketimpangan distribusi pendapatan

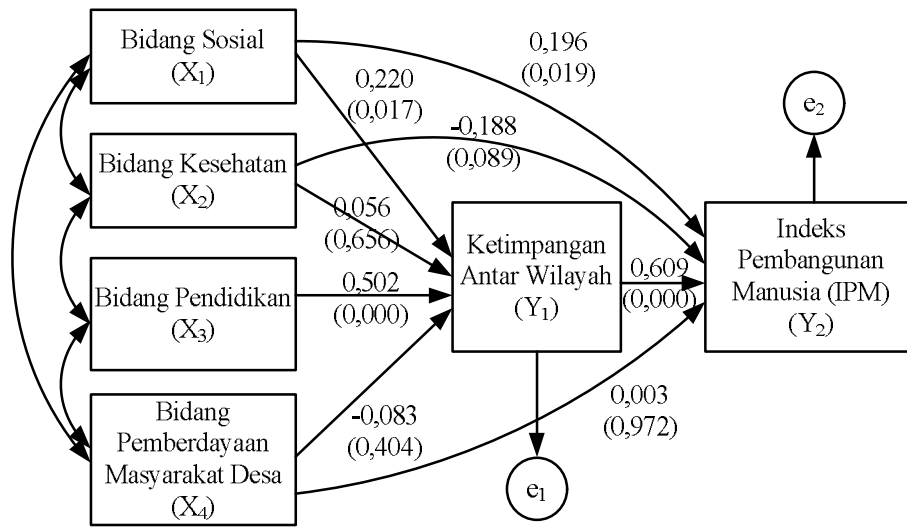
Y_2 adalah Kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1 mendeskripsikan bahwa pengeluaran pemerintah bidang social, kesehatan, pendidikan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, sedangkan pengeluaran pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat desa tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan bidang pemberdayaan masyarakat desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan pengeluaran pemerintah bidang sosial dan pendidikan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil olahan data dengan menggunakan program SPSS maka dapat disusun estimasi model analisis regresi, yaitu dilakukan pada masing-masing persamaan secara parsial sebagai berikut.

$$Y_1 = 0,220 X_1 + 0,056 X_2 + 0,502 X_3 - 0,083 X_4 \dots\dots\dots (1)$$

$$Y_2 = 0,196 X_1 - 0,188 X_2 + 0,315 X_3 + 0,003 X_4 + 0,609 Y_1 \dots\dots\dots (2)$$



Gambar 1 Standardized Path Diagram

Pengaruh Langsung, Tidak Langsung dan Total Variabel Penelitian

Berdasarkan Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa pengaruh langsung bidang sosial terhadap ketimpangan distribusi pendapatan adalah sebesar 0,220. Pengaruh langsung bidang kesehatan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan adalah sebesar 0,056, Pengaruh langsung bidang pendidikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan adalah sebesar 0,502, dan berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar 0,315. Pengaruh tidak langsungnya sebesar 0,306. Dengan demikian, pengaruh totalnya menjadi 0,621.

$$\begin{aligned}
 R^2_m &= 1 - \rho_{e1}^2 \cdot \rho_{e2}^2 \cdot \rho_{e3}^2 \cdot \rho_{e4}^2 \cdot \rho_{e5}^2 \dots \dots \dots (3) \\
 &= 1 - (0,699)^2 \cdot (0,806)^2
 \end{aligned}$$

$$= 0,682$$

Modifikasi Variabel

Oleh karena terdapat variabel yang tidak disimpulkan, maka hubungan tersebut hilangkan. Hasilnya disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2
Ringkasan Pengaruh Langsung, Tidak Langsung, dan Total Antarvariabel

Variabel	X1			X2			X3			X4			Y1		
	PL	PTL	PT	PL	PL	PTL	PT	PTL	PT	PL	PTL	PT	PL	PTL	PTL
Y1	0,220	-	0,220	0,056	-	0,056	0,502	-	0,056	-0,083	-	-0,083	-	-	-
Y2	0,196	-	0,196	-0,188	-	-0,188	0,315	0,306	0,621	0,003	-	0,003	0,609	-	0,609

Keterangan :

PL = Pengaruh Langsung

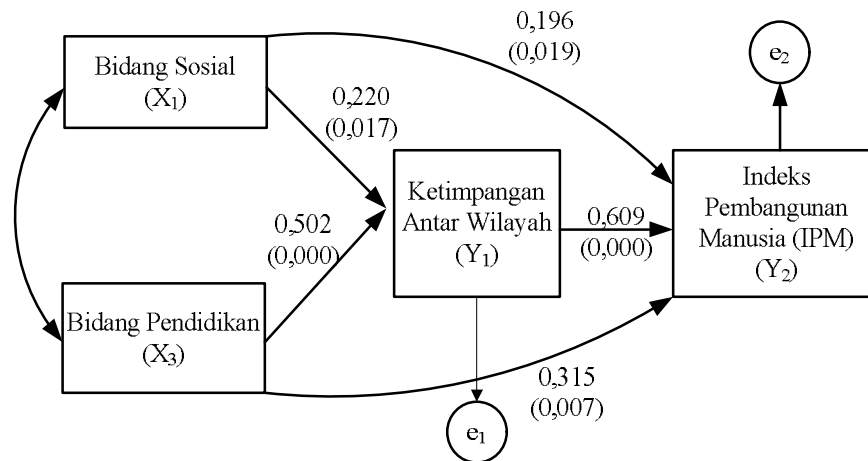
PTL= Pengaruh Tidak Langsung

PT = Pengaruh Total

Model hasil analisis variabel pengeluaran pemerintah bidang sosial, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat desa dan ketimpangan distribusi pendapatan dapat menjelaskan sebesar 68,2 persen terhadap variabel IPM, sedangkan sisanya 31,8 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

$$Y_1 = 0,220 X_1 + 0,502 X_3 \dots\dots\dots (4)$$

$$Y_2 = 0,196 X_1 + 0,315 X_3 + 0,609 Y_1 \dots\dots\dots (5)$$



Gambar 2 *Standardized Path Diagram Setelah Trimming*

Dari Gambar 2 telah diperoleh hubungan antar variabel yang menunjukkan adanya hubungan sebab akibat yang signifikan, dengan $P < \alpha = 0,05$, sehingga tidak perlu lagi dilakukan *trimming*. Hubungan tersebut adalah pengeluaran pemerintah bidang sosial dan pendidikan berpengaruh ke ketimpangan distribusi pendapatan bersifat langsung (*direct*) tanpa melalui perantara, dengan koefisien path pengaruh langsung sebesar 0,220 dan 0,502. Pengeluaran pemerintah bidang sosial dan pendidikan berpengaruh ke IPM bersifat langsung (*direct*) dengan koefisien path pengaruh langsung sebesar 0,196 dan 0,315. Dan bersifat tidak langsung melalui ketimpangan distribusi pendapatan dengan koefisien path pengaruh total sebesar 0,330 dan 0,621. Hal ini sesuai dengan hipotesis pada bab sebelumnya. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan yang diungkapkan oleh

Victor (2003) yang mengatakan bahwa pengeluaran pada sektor kesejahteraan sosial secara signifikan mempengaruhi IPM.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat simpulan sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran pemerintah bidang sosial memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota Provinsi Papua.
- 2) Pengeluaran pemerintah bidang sosial berpengaruh langsung dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota Provinsi Papua.
- 3) Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan memiliki pengaruh langsung terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota Provinsi Papua namun tidak signifikan.
- 4) Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh langsung dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota Provinsi Papua.
- 5) Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh tidak langsung dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota Provinsi Papua.
- 6) Pengeluaran pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat desa memiliki pengaruh langsung terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota Provinsi Papua namun tidak signifikan.

- 7) Pengeluaran pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat desa berpengaruh langsung dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota Provinsi Papua.

Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

- 1) Bagi pemerintah daerah hendaknya dapat mengalokasikan dan mengelola anggaran pengeluaran pemerintah dengan lebih baik dan dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga pengeluaran tersebut benar-benar mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sasarannya terutama pada masyarakat miskin yang belum tersentuh oleh program-program pemerintah.
- 2) Perhatian pemerintah daerah hendaknya tidak hanya meningkatkan anggaran, tetapi juga penajaman alokasi anggaran terutama untuk bidang kesehatan dan pemberdayaan masyarakat desa karena manusia yang sehat juga turut menentukan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan. Pengalokasian anggaran pengeluaran pemberdayaan masyarakat desa hendaknya sesuai kebutuhan masyarakat dan bersifat inovatif, serta adanya *political will* dan komitmen pemerintah terhadap alokasi pengeluaran untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

Badan Pusat Statistik RI. 2011. *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia*. beberapa terbitan. Jakarta.

BPS Provinsi Papua. 2008. *Indikator Makro Ekonomi Papua 2008*.

_____. 2009. *Papua Dalam Angka*. beberapa terbitan.

_____. 2010-2011. *Papua Dalam Angka*. beberapa terbitan.

_____. 2012. *Papua Dalam Angka*. beberapa terbitan.

Bappeda Papua. 2010. *Kajian Belanja Publik Papua 2010*. Yayasan Bakti.

Bappenas Papua. 2001. *Towards New Consensus: Democracy and Human Development in Indonesia*. www.undp.or.id.

_____. 2010. *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tahun 2009*.

Basri, Chatib. 2003. "Indeks Pembangunan Manusia Memburuk". Kompas Online.

Boedijoewono, Nugroho. 2001. *Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan*. Jilid 1.
UPP AMP YKPN. Yogyakarta.

Chakraborty, Lekha S. 2003. Public Expenditure and Human Development : An Empirical Investigation, *Journal of Human Development*, National Institute of Public Finance and Policy, India, www.nipfp.org.in.

Chopra, P.N. 1981. *Micro Economics: Welfare Economics*. New Delhi: Kalyani Pulisher.